

Abstrak

Korupsi merupakan hambatan terbesar bagi ekonomi dan perkembangan sosial. Ada banyak jenis korupsi yang dikenal di Indonesia. Salah satu institusi penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi adalah Kejaksaan. Penerimaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan penerimaan lainnya, termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem serta mengetahui masalah dalam pengelolaan PNBP dan upaya dalam peningkatan PNBP. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem dilakukan dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan PNBP adalah kesalahan dalam pencatatan akun penerimaan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PNBP adalah dengan mengupayakan adanya kegiatan dari produk kejaksaan sendiri tiap tahun dan dilakukan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PNBP, kejaksaan, korupsi, pelanggaran lalu lintas

Abstract

Corruption is the biggest obstacle to economic and social development. There are many known types of corruption in Indonesia. One of the law enforcement institutions in the crackdown on corruption cases is the Prosecutor's Office. State revenues derived from corruption crimes such as payment of money instead of corruption, state spoils derived from corruption, and other revenues, including non-tax state revenues (PNBP) managed by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This research aims to find out how PNBP management in the Karangasem State Prosecutor's Office, problems in the management of PNBP, and efforts to improve PNBP. This research is carried out through literature studies and field studies. Based on the study's results, the management of PNBP at the Karangasem State Prosecutor's Office was carried out in several stages: planning, implementation, accountability, and supervision. The problem encountered is an error in the recording of the receipt account. The effort made to increase PNBP is to strive for the activities of the prosecutor's products every year and carried out in an ongoing manner.

Keywords: PNBP, prosecutors, corruption, traffic violations